

CULTURAL JAMMING ON SATIRE WEBSITES AS A FORM OF DIGITAL DEMOCRACY

Zaenab Zaenab

Program Studi Periklanan, Politeknik Negeri Media Kreatif

Korespondensi: Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, DKI Jakarta, Indonesia 12640

Surel: zaenab13@polimedia.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 01/12/2021

Direvisi: 24/09/2022

Dipublikasi: 30/09/2022

e-ISSN: 2721-0995

p-ISSN: 2721-9046

Kata Kunci:

New Media,
Cultural Jamming,
Political Jamming,
Websites Satir,
Demokrasi.

Keywords:

New Media,
Cultural Jamming,
Political Jamming,
Satirical Websites,
Democracy.

ABSTRAK *Cultural Jamming* pada *Websites Satir* sebagai **Bentuk Demokrasi Digital**. *New media* atau media berbasis internet telah menjadi *platform* yang berkontribusi dalam perubahan cara dan gaya masyarakat modern mengakses dan memaknai sebuah informasi. Karakteristik *new media* yang cepat, mudah, murah dan daya sebarannya yang luas nyatanya mampu menjadi wadah bagi penggunaannya untuk memperluas spektrum demokrasi terutama di Era digital. Dalam penelitian ini, peneliti fokus terhadap konten website satir yang memuat bentuk *political jamming*. Melalui metode analisis isi, peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang dalam mengenai sebuah fenomena sosial yang belakangan ini berkembang dalam bentuk *websites satir*. Pendekatan strukturasi milik Anthony Giddens digunakan untuk landasan dalam menganalisis konten *websites satir* sebagai sebuah fenomena realisasi dari demokrasi digital.

ABSTRACT *Cultural Jamming on Satire Websites as a Form of Digital Democracy*. *New media or internet-based media has become a platform that contributes to changes in the way and style of modern society accessing and interpreting information. The characteristics of new media which are fast, easy, inexpensive, and have the widespread ability are in fact able to become a forum for its users to expand the spectrum of democracy, especially in the digital era. In this study, researchers focused on satirical website content that included forms of political jamming. Through the method of content analysis, the researcher wants to get a deep understanding of a social phenomenon that has recently developed in the form of satirical websites. Anthony Giddens' structuration approach is used as a basis for analyzing satirical website content as a phenomenon for the realization of digital democracy.*

PENDAHULUAN

Gaya berkomunikasi terutama dalam hal penyampaian pendapat maupun kritik yang konvensional yakni bersifat apa adanya dan secara terang-terangan diungkapkan dalam bentuk kalimat komentar apalagi menggunakan media tradisional dinilai terlalu *mainstream* dan kurang menarik perhatian publik terhadap topik tertentu yang diangkat di media komunikasi tersebut. Menurut Young, gaya berkomunikasi satir walaupun sering kali berupa konten parodi namun nyatanya merupakan sebuah imitasi dari pesan yang sebenarnya dimaksudkan, bahkan gaya berkomunikasi satir mampu menarik dan merangkul publik atau audience dengan cara yang lebih kritis dan memiliki unsur keterkaitan kognitif dengan pengalaman sosial dan politik (2020). (A/P Mahinder Singh & Puyok, 2021)

New media atau media berbasis internet telah menjadi platform yang berkontribusi dalam perubahan cara dan gaya masyarakat modern dalam mengakses dan memaknai sebuah informasi. *New media* dipilih sebagai media untuk mengakses dan membagi informasi bukan tanpa alasan hal ini tentunya berkaitan erat dengan karakteristik dari *new media* itu sendiri yakni meliputi cepat, mudah, murah dan daya sebar yang luas. Hal lain yang menjadikan *new media* menjadi sangat digemari oleh masyarakat digital adalah karena media baru diyakini memberikan ruang baru bagi masyarakat digital untuk berdemokrasi. Demokrasi digital dalam hal ini didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi komunikasi guna memajukan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi (Sandy Allifiansyah, 2016).

Kemampuan *new media* untuk memberikan ruang baru untuk berdemokrasi menurut Mc Quail dikarenakan karakteristik *new media* yang dinilai bebas dari unsur "*power*". Bebas dari *power* dalam hal ini adalah kompleksitas dalam hal menentukan siapa pemilik *new media* tersebut sehingga makin sulit untuk mengetahui dan menebak keberpihakan sebuah informasi dan terkait siapa yang mengontrol konten berita dan aliran informasi di media baru tersebut.

"However...in respect of power for instance, it is much more difficult to locate the new media in relation to the possession and exercise of power. They are not as clearly identified in terms of ownership, nor is access monopolized in such a way that the content and flow of information can be easily controlled". (Mc Quail, 141: 2010)

Collins juga menambahkan bahwa pemerintah dan badan hukum juga tidak memiliki kontrol atau kemampuan untuk dapat mengatur media baru seperti yang mereka terapkan pada media konvensional atau *old media*.

Government and law do not control or regulate the internet in a hierarchical way as they do the 'old media' (Collins,2008).

Berdasarkan karakteristik *new media* tersebut kemudian hal inilah yang memicu munculnya fenomena komunikasi baru oleh masyarakat digital salah satunya adalah *cultural jamming* yakni berupa konten berita bernada satir di websites satir. Websites tersebut meliputi Mojok.co, Geotimes.co.id, Liputan9.com, dan Posronda.net.

Cultural jamming secara umum dapat dimaknai sebagai upaya yang mengusik, perlawanan atau serangan pada kekuatan yang mendominasi publik dalam bentuk penggunaan gambar-gambar, tanda-tanda yang memanipulasi makna sebenarnya. *Cultural Jamming* juga dimaknai sebagai sikap perlawanan terhadap kemapanan, kemapanan yang bersifat mendiktekan keinginan para kelompok dominan terhadap orang lain. Kemapanan disini adalah berupa aturan, nilai dan struktur-struktur yang diciptakan para penguasa baik itu pemerintah, pemilik modal atau pemimpin (Zane, 2017).

Pada awalnya *cultural jamming* merupakan suatu gerakan yang keberadaannya muncul didasarkan pada sikap anti kapitalisme, dan menjadikan karya seni seperti lukisan, gambar, tanda, grafiti sebagai sarana bagi perwujudan sikap kontra mereka terhadap segala produk dari kapitalisme ini. Bentuk-bentuk dari jamming tersebut dapat dilakukan dalam beberapa acara yakni dengan aksi turun di jalan atau aksi demonstrasi dengan menggunakan atau menyebarkan brosur atau membawa poster, melalui media mainstream yakni dalam program-program yang mengusung unsur-unsur humor yang bermakna sindiran. Kini bentuk dari *cultural jamming* ini dapat berupa gambar yakni memes di internet, grafiti, photo-doctoring atau photo-editing yang di plesetkan dengan teks yang bermakna serta berintensi serius (Bart, Cammaerts. 2007).

Bentuk dari *cultural jamming* yang paling umum kita temukan di era digital adalah *political jamming* yakni penggunaan teknik *cultural jamming* oleh pemeran politik (politikus) juga warga negara (masyarakat) dalam berkomunikasi politik baik dalam lingkup *mainstream public* maupun kontradiksi nya yakni *counter-public*. *Jamming* politik ini juga perlu dilihat

sebagai sebuah cara untuk mengatasi kekacauan realitas, *discourse* nya bersifat melawan, namun menggunakan cara-cara seperti humor, pengejekkan, satir dan parodi. *Political jamming* ini juga bukan hanya dilakukan oleh para aktivis untuk menegakkan keadilan bahkan juga untuk mempermalukan, membuat bahan bercandaan atau bahkan menjadikan korbannya baik seseorang individu maupun kelompok menjadi musuh bersama (Zane, 2017).

Pada praktiknya, konten berita di *websites* satir tersebut nyatanya tidak hanya hadir sebagai sebuah konten parodi akan keadaan sosial dan politik yang sifatnya hanya sebagai lelucon belaka. Konten berita di *websites* satir tersebut berkembang menjadisebuah gaya komunikasi baru yang ternyata mampu mengandung muatan politik atau sarana guna mengkritisi kebijakan elit negara. Berdsarkan latar belakang tersebut maka dapat dikatakan bahwa fenomena persebaran konten berita di *websites* satir tersebut menjadi sebuah bentuk demokrasi digital gaya baru yang sekaligus menunjukkan genre gaya berkomunikasi di era media baru sebagai wujud dari *participatory digital culture* (Wiggins & Bowers, 2014).

TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat tiga kajian literatur dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka yang pertama adalah teori strukturasi dari Giddens yang digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana relasi antara agen dan struktur akhirnya akan membentuk sebuah norma dan kebiasaan yang dianut oleh kelompok masyarakat yang ada dalam lingkup media baru atau yang dalam era digital ini disebut sebagai Netizen. Anthony Giddens menyebut relasi antara agen dan struktur ini sebagai strukturasi, yang artinya sebuah *rule* atau aturan dan norma-norma dibentuk oleh interaksi antara agen dan struktur itu sendiri. Interaksi itu mereproduksi diri dan menciptakan sumber daya. Agen adalah aktor yang terlibat dalam menggerakkan, bahkan mengubah struktur sosial (Giddens 1984:16-17).

Tinjauan pustaka yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Sandy Allifiansyah yang berjudul *Kaum Muda, Meme dan Demokrasi Digital di Indonesia*. Penelitian Sandy berfokus pada beberapa konten Meme yang muncul ketika terjadi kontroversi kenaikan harga BBM dan keputusan DPR terkait pilkada tidak langsung. Meme dari dua peristiwa tersebut diperoleh dari media sosial Twitter dan Facebook. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan aspek mikro dan makro. Untuk melihat aspek mikro maka dipilih analisis

wacana milik Van Dijk dan analisis gambar milik Saussure. Sedangkan dalam konteks makro struktur dari Giddens digunakan untuk dapat menjelaskan tentang relasi antara agen dan struktur yang pada akhirnya akan membentuk sebuah norma dan kebiasaan yang dianut oleh kelompok yang ada dalam lingkup media baru.

Kajian literatur yang ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Pinckey Triputra dan Fievelia Sugita yang berjudul *Culture Jamming Phenomenon in Politics The Jokowi's Memes in TIME Publication's Cover and Tokobagus.com Advertisement*. Penelitian ini menganalisis memes presiden Jokowi di majalah TIME yang diterbitkan pada tahun 2014 dan meme yang merekonstruksi presiden Jokowi sebagai objek iklan Tokobagus.com. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif sedangkan data diambil dari media online. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis semiotika milik Roland Barthes.

METODE

Penelitian ini menganalisis sebuah fenomena menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dinilai sangat cocok digunakan untuk menganalisis permasalahan baru seperti perilaku masyarakat, kepercayaan masyarakat, dan norma sosial budaya yang dianut masyarakat. Pendekatan penelitian kualitatif paling tepat digunakan untuk sebuah penelitian yang ingin menjawab pertanyaan "mengapa" yang bertujuan untuk menjelaskan serta memahami permasalahan-permasalahan dan pertanyaan "bagaimana" untuk menjelaskan sebuah proses atau perilaku sebuah masyarakat (Monique Hennink, Inge Hutter, Ajay Bailey, 10:2011).

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi dipilih karena metode ini memuat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Teknik yang dilakukan meliputi mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi (Asfar, 2019). Melalui metode analisis isi peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang dalam mengenai sebuah fenomena sosial yang belakangan ini berkembang yakni bentuk *cultural jamming* berupa konten berita pada *websites satir*.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari media online yakni *websites satir* meliputi Mojok.co, Geotimes.co.id, Liputan9.com, dan

Posronda.net. Empat websites tersebut dipilih karena beberapa websites tersebut terbilang aktif mengunggah konten satir bermuatan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *cultural jamming* dalam bentuk konten berita di *websites* satir memang dapat dilihat sebagai bentuk demokrasi digital. Ditambah dengan peran *new media* dan karakteristiknya yang mudah, murah, cepat, daya sebarannya yang luas serta bebas nyatanya mampu mendukung terjadinya demokrasi digital di era informasi.

Namun benarkah apa yang dikatakan Mc Quail dan Collins bahwasanya tidak ada kontrol pemerintah dan hukum yang mengatur *new media* dalam hal ini adalah persebaran konten berita di *websites* satir. Jawabannya tidak sepenuhnya benar. Pemerintah sebagai struktur nyatanya memiliki *power* yang dalam hal ini bersifat menghambat atau *constraining* proses demokrasi digital *agent* atau agensi yang dalam hal ini adalah masyarakat virtual atau netizen yakni berupa pembredelan beberapa *websites* satir tersebut diantaranya PosRonda.net dan Liputan9 dengan alasan melanggar UU ITE karena dianggap mampu menyesatkan publik.

Namun, apakah kemudian demokrasi digital gagal diperoleh, nyatanya tidak sepenuhnya gagal. Walaupun terkesan negara sebagai struktur seolah menggagalkan upaya demokrasi digital 'agen' yakni masyarakat untuk menuangkan opini kiritiknya melalui konten berita di *websites* satir, nyatanya upaya pembredelan beberapa websites satir oleh pemerintah tidak bisa sepenuhnya dilihat sebagai sebuah bentuk kegagalan demokrasi digital namun justru sebaliknya keberhasilan. Keberhasilan darisebuah *cultural jamming* menurut Cammaraets adalah terusiknya kemapanan yang diciptakan oleh para pemegang kuasa dalam hal ini adalah pemerintah. Bentuk pembredelan *websites* satir oleh pemerintah ini kemudian dapat dilihat sebagai bentuk terusiknya struktur yang dalam hal ini adalah pemerintah.

Bentuk dari *cultural jamming* yang menjadi objek penelitian ini adalah berupa konten berita pada *websites* satir yang isi beritanya berupa parodi dari realitayang sebenarnya. *Discourse* nya terkesan mencibir, mengkritisi bahkan melawan baik itu aturan pemerintah maupun kondisi sosial politik yang sedang terjadi di msyarakat. Akan tetapi dalam

penyampaianya menggunakan teknik humor, sindiran dan parodi. Berikut adalah beberapa contoh konten berita-berita yang diambil dari beberapa websites satir meliputi Mojok.co, Geotimes.co.id, Liputan9.com, dan Posronda.net yang bertujuan untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah dan kondisi-kondisi sosial yang terjadi di masyarakat



Gambar 1. Salah satu konten cultural jamming bermuatan politik di *websites satir* Posronda.net.



Gambar 2. Salah satu konten cultural jamming bermuatan politik pada *websites satir* Geotimes.co.id

Bukan hanya konten berita yang bermuatan politik, konten berita yang dimuat pada websites satir juga sebagai bertujuan untuk mengkritik kebijakan- kebijakan pemerintah yang dinilai tidak atau kurang pro terhadap rakyat maupun kritik terhadap kondisi-kondisi

sosial yang terjadi di masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh konten berita di *websites* satir yang bertujuan untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah dan kondisi-kondisi sosial yang terjadi di masyarakat.



Gambar 3. Contoh konten di *websites* satir yang bertujuan untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah



Gambar 4. konten di *websites* satir yang bertujuan untuk mengkritikkondisi atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat

Pada praktiknya, konten berita di *websites* satir tersebut nyatanya tidak hanya hadir sebagai sebuah konten parodi akan keadaan sosial dan politik yang sifatnya hanya sebagai lelucon belaka. Konten berita di *websites* satir tersebut berkembang menjadi sebuah gaya komunikasi baru yang ternyata mampu mengandung muatan politik atau sarana guna

mengkritisi kebijakan elit negara. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dikatakan bahwa fenomena persebaran konten beritadi websites satir tersebut menjadi sebuah bentuk demokrasi digital gaya baru yang sekaligus menunjukkan genre gaya berkomunikasi di era media baru sebagai wujud dari *participatory digital culture* (Wiggins & Bowers, 2014).

Sedangkan jika dilihat menggunakan teori strukturasi, Giddens membagi dua elemen penting yakni "struktur" dan "agensi". Menurut Anthony Giddens yang dimaksud dengan "struktur" terdiri dari "*rules and resources*" yang dalam penelitian ini *rules* adalah peraturan pemerintah dan *resources* adalah pemerintah. Sedangkan "agensi" adalah individu/masyarakat. Struktur dalam hal ini baik yang terdiri dari aturan pemerintah (*rules*) maupun pemerintah (*resources*) dapat mempengaruhi agensi (kelompok masyarakat) dalam dua arti: memampukan (*enabling*) dan menghambat (*constraining*). Dalam pengertian Giddens, agensi juga dapat meninggalkan struktur, ia tidak selalu tunduk pada struktur. Ia dapat mencari kesempatan maupun kemungkinan untuk keluar dari peraturan dan ketentuan yang ada. Situasi ini disebut *dialectic of control*. Agensi dapat melawan struktur yang berupa kontrol: "*The more tightly-knit and inflexible the formal relations of authority within an organization, in fact, the more the possible openings for circumventing them*".

Perlu diingat bahwa karakteristik dari agensi menurut Giddens adalah tidak selalu tunduk pada struktur dan agensi tidak boleh dibayangkan sebagai manusia yang tolol, yang pasrah menerima nasib, melainkan sebagai manusia yang tahu dan paham akan segala permasalahan (Abdul Firman Ashaf, 2006: 212).

Kehadiran media baru yakni sebagai media yang berbasis internet dengan segala karakteristiknya yang mudah, murah, cepat, daya sebarannya yang luas dan bebas nyatanya mampu memfasilitasi kebebasan masyarakat di dunia virtual atau netizen untuk menyampaikan pendapat, menuangkan pikirannya tanpa keraguan. Salah satu media untuk menyampaikan pendapat, kritik serta opini tersebut adalah berupa konten berita parodi yang dimuat pada websites satir tersebut.

Terlepas dari karakteristik *new media* yang bebas seperti yang dikatakan oleh Mc Quail dan Collins bahwa *new media* merupakan *playground* untuk berdemokrasi secara digital dikarenakan karakteristiknya yang bebas dari unsur "*power*" dan pemerintah serta badan hukum juga tidak memiliki kontrol atau kemampuan untuk dapat mengatur media baru

seperti yang mereka terapkan pada media konvensional atau *old media*. Namun, menurut Giddens struktur dalam hal ini baik yang terdiri dari aturan pemerintah (*rules*) maupun pemerintah (*resources*) dapat mempengaruhi agensi (kelompok masyarakat) dalam dua arti: memampukan (*enabling*) dan menghambat (*constraining*).

Konteks konten berita yang di publikasi melalui websites satir ternyata pemerintah sebagai struktur dalam hal ini bersifat menghambat atau *constraining*. Bentuk dari hambatan tersebut yakni berupa pembredelan beberapa websites satir tersebut diantaranya PosRonda.net dan Liputan9 dengan alasan melanggar UU ITE karena dianggap mampu menyesatkan publik (Kompasiana, 2014).

SIMPULAN

Fenomena komunikasi baru yakni berupa konten berita parodi di *websites* satirs yang seolah hanya mengusung topik-topik parodi dan bertujuan menghibur dengan slogan “*your one stop political infotainment*” nyatanya adalah bentuk dari *cultural jamming* di era digital. Walaupun terkesan negara sebagai struktur seolah menggagalkan upaya demokrasi digital agen yakni masyarakat melalui upaya pembredelan beberapa websites satir tersebut oleh pemerintah, namun hal ini tidak bisa sepenuhnya dilihat sebagai sebuah bentuk kegagalan demokrasi digital namun justru sebaliknya keberhasilan dari sebuah *cultural jamming* di era digital karena pembredelan websites satir dilihat sebagai bentuk terusiknya kemampuan struktur yang dalam hal ini adalah pemerintah.

REFERENSI

- Asfar, T. (2019). *Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik* (Penelitian Kualitatif). 14A17007, 2.
- Allifiansyah, S. (2016). Kaum Muda, *Meme*, dan Demokrasi Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 13 (2), 151-164.
- Ashaf, A. (2006). Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens sebagai Alternatif. *Jurnal Sosiohumaniora*. 8 (2), 205-218.
- Bart, C. (2007). *Jamming the Political: Beyond Counter-Hegemonic Practices*. *LSE Research Online*
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society*. Cambridge. UK: Polity Press

- Harveena K. & Puyok, A. (2021). *Political Satire and Its Influence on Youth Political*. London: Sage Publications.
- Hennink, Hutter, Bailey. (2011). *Qualitative Research Methods*. London: Sage Publications.
<https://www.kompasiana.com/iskandarjet/54f756b7a33311d2338b4656/garagara-artikel-mers-pemilik-blog-pos-ronda-akan-dijerat-dengan-uu-ite>
- Kompasiana. (2014). "Gara Gara Artikel Mers Pemilik Blog Pos %20Ronda Akan Dijerat dengan UU ITE" ([kompasiana.com/image/iskandarjet/54f756b7a33311d2338b4656/garagara-artikel-mers-pemilik-blog-pos-%20ronda-akan-dijerat-dengan-uu-ite?page=1](https://www.kompasiana.com/image/iskandarjet/54f756b7a33311d2338b4656/garagara-artikel-mers-pemilik-blog-pos-%20ronda-akan-dijerat-dengan-uu-ite?page=1))
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. London, Sage Publications. New York, NY: Sage Publications.
- Triputra, F. (2016). Culture Jamming Phenomenon in Politics (The Jokowi's Memes in Time Publication's cover and Tokobagus.com Advertisement). *Journal of US-China Administration*. 13 (6), 386-396.
- Wiggins & Bowers. (2014). *Memes as Genre: A structural analysis of the memescape*. Trends in Undergraduate Research. (2021). 4(2):h18- 28
- Zane. (2017). "Jamming the Political: beyond counter-hegemonic practices", (<https://nezia13.wordpress.com/2017/05/01/jamming-the-political-beyond-counter-hegemonic-practices/>)